KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Industri tumbuh 5,87 persen, DPR harap serapan tenaga kerja naik
Tanggal : Rabu, 11 November 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Industri Tumbuh 5,87 Persen

DPR Harap Serapan Tenaga Kerja Naik



FOTO: TEDY KROENINGRAT/JPG

Asep Wahyuwijaya

ANGGOTA Komisi VI DPR Asep Wahyuwijaya menyoroti pertumbuhan industri manufaktur yang melampaui ekonomi nasional, tapi belum diikuti penyerapan tenaga kerja signifikan. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Agustus 2026, jumlah pekerja industri hanya bertambah sekitar 0,2 persen dalam setahun.

Asep mengungkapkan, industri pengolahan tumbuh 5,87 persen pada triwulan III-2026, lebih tinggi dibandingkan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen. Namun, proporsi pekerja industri terhadap tenaga kerja turun dari 13,86 persen jadi 13,75 persen. Kondisi itu menunjukkan pertumbuhan industri belum berdampak pada lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Contohnya, lanjut Asep, terjadi di Jawa Tengah, ketika 6.604 pekerja kehilangan pekerjaan dalam tujuh bulan pertama 2026, dan lebih dari separuhnya berasal dari industri tekstil. "Di saat yang sama Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 63.789 pekerja terkena PHK sepanjang Januari hingga September 2026, terbanyak di Jawa Barat dan Banten," katanya, Selasa (10/11/2026).

Menurut Asep, persoalan utama industrialisasi nasional bukan terletak pada kurangnya program Pemerintah, melainkan indikator keberhasilannya. Karena selama ini ukurannya hanya diukur dari nilai investasi, pabrik baru, dan serapan anggaran. Sehingga bisa ada pabrik baru tanpa pekerjaan baru, pemasok lokal, dan nilai tambah di dalam negeri.

Asep mengidentifikasi enam persoalan yang menghambat dampak industrialisasi itu. Yakni pertumbuhan terkonsentrasi pada subsektor tertentu, ketergantungan bahan baku impor, ketidakpastian pasokan gas industri, dan investasi yang kian padat modal. Selain itu, produk impor ilegal masuk ke pasar domestik, serta biaya logistik dan pembiayaan tinggi.

Untuk itu, dia mengusulkan tiga tingkatan indikator. Pertama, keluaran administratif seperti jumlah proyek dan realisasi anggaran. Kedua, pemanfaatan kapasitas produksi, keterlibatan pemasok lokal, dan kepastian pasokan gas. "Ketiga, dampak akhir berupa nilai tambah domestik, pekerja formal terserap per Rp1 triliun investasi, dan pertumbuhan upah riil," terangnya.

Lebih lanjut, dia juga menyoroti rencana investasi Danantara senilai Rp 225 triliun untuk 26 proyek hilirisasi. Investasi itu wajib memberi manfaat lebih besar bagi industri dalam negeri, lewat penguatan pemasok lokal, pengadaan BUMN yang menyerap produk domestik, kepastian pasokan gas, dan pembiayaan rantai pasok melalui perbankan BUMN.

Asep menilai, setiap proyek hilirisasi perlu melaporkan dampaknya secara berkala setiap enam bulan, terutama terhadap penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah dalam negeri. Karena keberhasilan industrialisasi tidak cukup diukur dari tingginya pertumbuhan manufaktur. "Keberhasilan tercermin dari makin banyaknya masyarakat yang memperoleh pekerjaan," tegasnya. ■ PYB